



**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM
TAHUN 2020**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2020 ini.

Renja adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2020.

Semoga Renja ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, 26 Juli 2019

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Batam



NURZALIE, AP, S.Sos

NIP. 19730206 199311 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM TAHUN 2019	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM	26
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	28
3.3 Program dan Kegiatan	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM	34
BAB V PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019	8
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
Tabel 3	Pemetaan Permasalahan Umum untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	15
Tabel 4	Prioritas, Sasaran dan Program RKPD Tahun 2020	19
Tabel 5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020	22
Tabel 6	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
Tabel 7	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	29
Tabel 8	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021	31
Tabel 9	Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 2020	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Agar pembangunan daerah lebih terarah dan terukur maka diperlukan perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

- Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- j. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- k. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2021 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42);
- o. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);

- p. Peraturan Daerah Kota Batam No 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
- q. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);
- r. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batan Nomor 108);
- s. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 488);
- t. Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 685).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuannya dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstrad dan RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2020 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKOTA BATAM TAHUN 2018

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan pencapaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, Isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

Memuat telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

Memuat rencana kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra

Pada Renja tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merencanakan 3 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
 - 1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
 - 1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat:
 - 1) Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah;
 - 2) Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam;
 - 3) Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan;
 - 4) Pengamanan Obyek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam;
 - 5) Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas.

Program dan kegiatan tersebut diakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan program dan kegiatan yang sama sebagaimana tertuang dalam Renja.

Berikut ini disajikan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan pencapaian Renstra:

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019

Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
	01 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
	01 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	1. Jumlah aksi demo yang diamankan	50 kali	25 kali	25 kali	25 kali	100	25 kali	25 kali	50
	01	Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100	12 kali	12 kali	100
	02	Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	12 kali	10 kali	12 kali	3 kali	25	12 kali	12 kali	100
	03	Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	100	30 hari	30 hari	100
	04	Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam	50 kali	25 kali	25 kali	25 kali	100	25 kali	25 kali	50
		2. Jumlah Linmas yang diberdayakan	344 orang	60 orang	120 orang	150 orang	125	80 orang	80 orang	23,26
	05	Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas	344 orang	60 orang	120 orang	150 orang	125	80 orang	80 orang	23,26

Dari pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2018, ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, memenuhi target kinerja dan melebihi target kinerja yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2018 dan Renstra dengan rincian sebagai berikut:

a. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Renja Tahun 2018:

- 1) Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam, di mana pelaksanaan kegiatannya hanya sebanyak 3 kali dari 12 kali yang direncanakan dalam Renja Tahun 2018 dan Renstra dengan tingkat realisasi hanya 25%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target adalah karena defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kota Batam sehingga dilakukan pemotongan anggaran pada kegiatan tersebut.

b. Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja Renja Tahun 2018:

- 1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;
- 3) Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan, dengan realisasi pelaksanaan 100% yaitu selama 30 hari sesuai dengan Renja, sehingga tingkat capaian realisasinya juga 100%.

Terpenuhinya target kegiatan tersebut karena komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk menjaga kekhusukan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa sehingga selama 30 hari penuh dilakukan pengawasan terhadap jam operasional THM, dan pada kegiatan tersebut juga tidak dilakukan pemotongan anggaran.

- 4) Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam, dengan realisasi pelaksanaan 100% yaitu sebanyak 25 kali sesuai dengan Renja, sehingga tingkat capaian realisasinya juga 100%.

Meskipun tingkat capaian realisasi sebesar 100% dari Renja Tahun 2018, namun capaian kinerja realisasi Tahun 2018 masih belum memenuhi capaian target kinerja Renstra, yaitu 50kali. Capaian kinerja tahun 2018 baru memenuhi 50% dari target Renstra.

Hal ini terjadi karena sepanjang tahun 2018 tidak banyak aksi-aksi demonstrasi yang menandakan kondisi keamanan dan ketertiban maupun politik dan ekonomi di Batam cukup kondusif.

- c. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja Renja Tahun 2018:

- 1) Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas, dengan realisasi pelaksanaan sebanyak 150 orang sedangkan target capain Renja sebanyak 120 orang. Dengan demikian tingkat capaian realisasinya sebesar 120%.

Capaian kinerja yang melebihi target ini karena komitmen Pemerintah Kota Batam untuk menyukseskan Pemilu 2019, sehingga disediak alokasi anggaran yang cukup besar untuk pelatihan linmas guna meningkatkan sumber daya linmas saat bergugas mengamankan pelaksanaan pemilu di TPS.

Meskipun tingkat capaian realisasi sebesar 120% dari Renja Tahun 2018, namun capaian kinerja realisasi Tahun 2018 masih belum memenuhi capaian target kinerja Renstra, yaitu 344 orang. Capaian kinerja tahun 2018 baru memenuhi 43,60% dari target Renstra.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019 telah memenuhi target kinerja Renja 2018 dan Renstra, meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target. Oleh karena itu diperlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Batam melalui TAPD dalam memberikan pagu anggaran yang cukup kepada Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Batam agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat memenuhi target kinerja Renja maupun Renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dalam Renstra Tahun 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan 3 (tiga program) yaitu Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat.

Berikut ini adalah pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2018 :

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2018)	Tahun n-1 (2019)	Tahun n (2020)	Tahun n+1 (2021)	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Jumlah aksi demo yang diamankan			50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	Realisasi capaian 50% menunjukkan kondisi batam relatif kondusif sehingga aksi-aksi demo tidak terlalu banyak
4	Jumlah Linmas yang diberdayakan			344 orang	344 orang	344 orang	344 orang	150 orang	80 orang	100 orang	100 orang	Target capaian disesuaikan dengan kemampuan anggaran

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang ada, realisasi capaian kinerja pada 2 (dua) indikator telah tercapai, yaitu Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan tingkat capaian 100%.

Namun ada 2 indikator kinerja yang realisasi capaiannya tidak memenuhi target Renstra yaitu indikator kinerja jumlah aksi demo yang diamankan dengan realisasi capaian hanya 50%, di mana dari target 50 aksi demo yang diamankan ternyata hanya ada 25 aksi demo yang terjadi sepanjang tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Batam secara umum kondusif sehingga aksi-aksi demo yang relatif sedikit. Sedangkan untuk indikator kinerja jumlah Linmas yang diberdayakan, dari target 344 orang hanya terealisasi 150 orang dengan tingkat realisasi capaian 43,60%. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Batam, sehingga realisasi pemberdayaan Linmas disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Sejak pertama kali dikembangkan menjadi kota industri, perdagangan, jasa dan alih kapal pada awal tahun 1970an, Kota Batam telah mengalami banyak kemajuan. Pengembangan Kota Batam oleh Pemerintah Pusat tak terlepas dari letak Kota Batam yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga dan daerah-daerah yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional, hal ini tentu berimplikasi positif pada posisi geostrategik Kota Batam. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kota Batam menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk berinvestasi dan merelokasi aktivitas ekonomi mereka ke Batam, mulai dari aktivitas industri, perdagangan maupun jasa.

Pengembangan dan kemajuan Kota Batam juga menjadi daya tarik bagi pendatang dari berbagai daerah sehingga menjadikan kota ini kota yang heterogen dengan multikultur dan menjadi miniatur

Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di kota ini yang berdampak kepada meningkatnya jumlah penduduk.

Kondisi ini selain berdampak positif yaitu menambah khasanah kekayaan budaya juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen sangat rawan menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mengidentifikasi beberapa permasalahan umum terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terkait tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Pemetaan Permasalahan Umum Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3)	Penegakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum masih kurang	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum 2. Pemahaman aparaturnya terhadap tugas pokok dan fungsi Satpol PP masih kurang
2	Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah	Penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah masih kurang	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum 2. Pemahaman aparaturnya terhadap tugas pokok dan fungsi Satpol PP masih kurang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat tinggi	Penerapan sistem keamanan lingkungan masih kurang	Jumlah Linmas masih sedikit dan kurang diberdayakan
4	Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	Sarana dan prasarana masih terbatas	Alokasi anggaran masih kurang

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 adalah:

- a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan fokus pada isu 1) menghadirkan *Clean Government*, 2) meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan, dan 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan;
- b. Peningkatan kualitas, pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah, dengan fokus pada isu 1) penanganan ruas jalan strategis nasional dan provinsi, jalan-jalan di kawasan pemukiman maupun ruas jalan non status yang mempunyai nilai strategis dan ekonomi, 2) penanganan perumahan kumuh, penyediaan rumah murah dan Rusun, serta Peningkatan sarana dan prasarana utilitas kawasan pemukiman, 3) penyediaan transportasi massal darat dan laut yang murah dan representatif guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah perkotaan dan hinterland, 4) penanggulangan banjir.
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat yang Berdaya Saing, dengan fokus pada isu 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan, 2) meningkatkan kualitas pelayanan dan jangkauan Kesehatan masyarakat, 3)

pengentasan dan pemberdayaan masyarakat miskin, 4) meningkatkan pemberdayaan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial,

- d. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan fokus pada isu 1) pemenuhan standar ruang terbuka hijau, 2) pengelolaan persampahan, 3) pengelolaan sumberdaya air, 4) pengelolaan limbah secara terpadu, 5) pengurangan efek rumah kaca, 6) penanggulangan potensi resiko kekeringan.
- e. Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, dengan fokus pada isu 1) kualitas dan daya saing tenaga kerja, 2) kualitas transportasi publik untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dalam melakukan tindakan ekonomi, 3) akses permodalan, kualitas produk dan akses pemasaran produk UMKM.
- f. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan fokus pada isu 1) pengembangan konsep Kota Pintar (Smart city), 2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, 3) meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan.
- g. Peningkatan kualitas produk kepariwisataan (jasa dan perdagangan sebagai unggulan Kota Batam), dengan fokus pada isu 1) ekowisata bahari, 2) pusat wisata kuliner, 3) wisata historis dan budaya, 4) investasi pariwisata, 5) promosi pariwisata.

Dari beberapa isu strategis Kota Batam tersebut, yang relevan dan penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam penyelenggaraan layanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

- a. reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan efektif dan efisien, karena tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap kinerja (*performance*) dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompetensi

aparatur). Hal ini merupakan tantangan besar di masa yang akan datang.

- b. Penertiban pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum terutama yang berada di daerah milik jalan guna mendukung pembangunan infastruktur khususnya jalan yang bernilai strategis dan ekonomi;
- c. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yan masih harus terus ditingkatkan;
- d. Peningkatan sistem keamanan lingkungan guna menghadapi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Kota Batam Tahun 2020, tema yang diambil adalah “Pemantapan Infrastruktur, Peningkatan dan Pemerataan Kualitas SDM serta Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi untuk Mendukung Pembangunan Kota Modern yang Maju dan Berkelanjutan”, dengan 3 (tiga) prioritas pembangunan yaitu:

- a. Penguatan pembangunan infrastruktur melalui pemanfaatan ruang yang selaras dan berkelanjutan;
- b. Pemanfaatan sumber daya manusia yang unggul;
- c. Peningkatan kinerja pembangunan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan daya saing global.

Prioritas, Sasaran, dan Program RKPD Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4**Prioritas, Sasaran, dan Program RKPD Tahun 2020**

Tema: Pemantapan Infrastruktur, Peningkatan dan Pemerataan Kualitas SDM serta Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi untuk Mendukung Pembangunan Kota Modern yang Maju dan Berkelanjutan.

No	Prioritas	Sasaran Prioritas	Program Prioritas
1	2	3	4
1	Penguatan pembangunan infrastruktur melalui pemanfaatan ruang yang selaras dan berkelanjutan	1 Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap dan dalam kondisi baik	1 Program pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan/pelantar
			2 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
		2 Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam rangka pengendalian banjir	1 Program pengendalian banjir dan perbaikan jaringan pengairan
		3 Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan nyaman	1 Program penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal
			2 Program pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi
			3 Program pengembangan, pembangunan aksesibilitas dan konektivitas
		4 Tersedianya infrastruktur pelayanan dasar daerah <i>mainland dan hinterland</i>	1 Percepatan infrastruktur kelurahan (PIK)
			2 Program pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan di hinterland
			3 Program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di hinterland
			4 Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih dan sanitasi
			5 Program pengembangan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana prasarana permukiman dan perumahan

No	Prioritas	Sasaran Prioritas	Program Prioritas
1	2	3	4
		5 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	1 Program pembangunan, peningkatan kualitas dan pengawasan bangunan
		6 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat	1 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
			2 Program lingkungan sehat
		7 Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	1 Program perencanaan dan pengendalian tata ruang
2	Pembangunan Sumber daya manusia yang unggul	1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1 Program wajib belajar pendidikan dasara
			2 Progrm Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
			3 Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan
			4 Program Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
		2 Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	1 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
			2 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
			3 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat
			4 Peningkatan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
			5 Program Jaminan Kesehatan Daerah
			6 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta kesehatan lingkungan
3	Peningkatan Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Investasi untuk Mewujudkan Daya Saing Global	1 Meningkatkan PAD Kota Batam dari sektor perdagangan dan jasa	1 Program Penataan, pembinaan dan pengendalian pasar
			2 Program Pentaan, pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			3 Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
		2 Meningkatnya pengembangan pariwisata	1 Program Pengembangan Sektor Pariwisata
		3 Meningkatnya Investasi Kota Batam	1 Peningkatan Investasi dan kerjasama pembangunan

No	Prioritas	Sasaran Prioritas	Program Prioritas
1	2	3	4
		4 Terpenuhiya konsumsi pangan dan keamanan pangan	1 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perikanan
			2 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perikanan
			3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
		5 Berkembangnya sentra industri potensial, industri kecil menengah dan UMKM	1 Program Peningkatan, pembinaan dan pengembangan UKM dan koperasi serta usaha ekonomi masyarakat

Dari Prioritas, Sasaran, dan Program RKPD Tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam akan memiliki peran yang penting pada prioritas pertama yaitu penguatan pembangunan infrastruktur melalui pemanfaatan ruang yang selaras dan berkelanjutan. Dengan geliat pembangunan infrastruktur yang digagas oleh Walikota Batam, maka dukungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk menertibkan dan menata lokasi-lokasi yang akan dijadikan objek pembangunan sangat penting, terutama bangunan atau kios-kios liar di sepanjang jalan utama yang dibangun. Demikian juga dengan pembangunan infastruktur lainnya. Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan infrastruktur, Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah, Kegiatan Pengawasan dan Pendataan Pelanggaran Ketertiban Umum, maupun kegiatan lainnya.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%		
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam	Tersedianya administrasi perkantoran	100%	25,548,056,963.00		Batam	Tersedianya administrasi perkantoran	100%	19,977,189,568.00	Prioritas
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	795,000,000.00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	630,110,704.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Tersedianya sarana aparatur	100%	600,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Tersedianya sarana aparatur	100%	245,979,500.00	Prioritas
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Terpeliharanya sarana aparatur	100%	195,600,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Tersedianya sarana aparatur	100%	384,131,204.00	Prioritas
03	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan		1. Jumlah aksi demo yang diamankan	25 kali		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan		1. Jumlah aksi demo yang diamankan	25 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lingkungan Masyarakat					Lingkungan Masyarakat					
	Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah	Batam	Terlaksananya penertiban rumah liar dan kios liar/bangunan bermasalah di lahan milik Pemerintah	15 kali	1.529.777.500.00	Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah	Batam	Terlaksananya penertiban rumah liar dan kios liar/bangunan bermasalah di lahan milik Pemerintah	12 kali	691,495,000.00	Prioritas
	Operasi Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam	Batam	Terlaksananya Operasi Yustisi Terhadap Pelanggaran Perda	15 kali	428,400,000.00	Operasi Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam	Batam	Terlaksananya Operasi Yustisi Terhadap Pelanggaran Perda	12 kali	197,250,000.00	Prioritas
	Sosialisasi dan Penyuluhan Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	Batam	Jumlah masyarakat yang paham tentang perda/perkada yang ada di Kota Batam	900 orang	74,025,000.00	Sosialisasi dan Penyuluhan Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	Batam	Jumlah masyarakat yang paham tentang perda/perkada yang ada di Kota Batam	900 orang	134,325,000.00	
	Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan	Batam	Terkendalinya jam operasional tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadhan	30 hari	420,425,000.00	Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan	Batam	Terkendalinya jam operasional tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadhan	30 hari	501,525,000.00	Prioritas
	Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam	Batam	Terlaksananya Pengamanan unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkhis	25 kali	1,538,780,000.00	Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam	Batam	Terlaksananya Pengamanan unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkhis	25 kali	507,675,000.00	Prioritas

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan dan Pengawasan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Batam	Terlaksananya pendataan dan pengawasan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	12 bulan	150,000,000.00	Pendataan dan Pengawasan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Batam	Terlaksananya pendataan dan pengawasan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	12 bulan	175,375,000.00	
	Pemantapan kinerja tenaga fungsional dan PPNS Satpol PP	Batam	Jumlah tenaga fungsional dan PPNS Satpol PP yang terampil	70 orang	150,000,000.00	Pemantapan kinerja tenaga fungsional dan PPNS Satpol PP	Batam	Jumlah tenaga fungsional dan PPNS Satpol PP yang terampil	70 orang	107,200,000.00	Prioritas
			2. Jumlah Linmas yang diberdayakan	344 orang				2. Jumlah Linmas yang diberdayakan	344 orang		
	Pembinaan Linmas dan Peringatan HUT Linmas	Batam	Jumlah Satlinmas yang paham tentang tugas dan fungsi linmas	100 orang	580,000,000.00	Pembinaan Linmas dan Peringatan HUT Linmas	Batam	Jumlah Satlinmas yang paham tentang tugas dan fungsi linmas	100 orang	212,625,000.00	Prioritas
	Peningkatan Pengamanan Pemilu Gubernur dan Walikota	Batam	Jumlah TPS yang diamankan	2923 TPS	1,600,000,000.00	Peningkatan Pengamanan Pemilu Gubernur dan Walikota	Batam	Jumlah TPS yang diamankan	2923 TPS	876,735,000.00	Prioritas

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan kepada pemerintah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun secara langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Menurut pengamatan kami selama pelaksanaan Musrenbang tahun 2019 mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota, tidak ada usulan program dan kegiatan yang disampaikan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat tidak disajikan dan dibahas pada sub bab ini.

Tabel 6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2020
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA BATAM

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "**Indonesia yang mandiri, adil dan makmur**".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan padaperiode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil

dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

- 2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
- 3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
- 4) RPJMN ke-4 (2020–2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Saat ini kita sedang memasuki masa akhir RPJMN ke-3 (2015-2019), yang juga akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, dan akan memasuki masa RPJMN ke-4 (2020-2024) sesuai dengan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019.

Oleh karena itu, maka pada RKP Tahun 2020, prioritas pembangunan masih merujuk pada RKP Tahun 2019 dan masih berpedoman pada visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla yaitu Nawacita.

Tema pembangunan pada RKP 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan prioritas nasional sebagai berikut:

- 1) Pembangunan manusia;
- 2) Penguatan konektivitas;

- 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi;
- 4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air, dan;
- 5) Satabilitas ketahanan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah berdasarkan misi adalah:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel dan transparan;
- b. Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi hidup bermasyarakat;

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah:

- a. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Rincian tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi
Pamong PrajaKota Batam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, bersih dan transparan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	68.08	70	72	75	80
2	Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi hidup bermasyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Partisipasi Linmas dalam ketertiban umum	344 orang	344 orang	344 orang	344 orang	344 orang	344 orang

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - 1) Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah;
 - 2) Kegiatan Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam;

- 3) Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Kegiatan Pemantapan Kinerja Tenaga Fungsional dan PPNS Satpol PP;
- 5) Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam;
- 6) Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam;
- 7) Kegiatan Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan;
- 8) Kegiatan Pembinaan Linmas dan Peringatan HUT Linmas;
- 9) Kegiatan Peningkatan Pengamanan Pemilu Gubernur dan Walikota.

Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2020 adalah berikut:

Tabel 8
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kota Batam

Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.0 5.01.01.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Batam							
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran	Batam	100%	19,977,189,568.00	APBD II	Prioritas	100%	22,973,768,000.00
1.01.1.01.0 5.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Pemerintah		100%					
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	100%	245,979,500.00	APBD II	Prioritas	100%	282,876,425.00
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	100%	384,131,204.00	APBD II		100%	441,750,885.00

Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.05.1.01 .05.01.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	1. Jumlah Aksi Demo yang diamankan		25 kali				25 kali	
	Penertiban Ruli dan Kili di Lahan Milik Pemerintah	Terlaksananya penertiban rumah liar dan kios liar/bangunan bermasalah di lahan milik Pemerintah	Batam	12 kali	691,495,000.00	APBD II	Prioritas	12 kali	795,219,250.00
	Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	Terlaksananya Operasi Yustisi terhadap pelanggaran Perda	Batam	12 kali	197,250,000.00	APBD II	Prioritas	12 kali	226,837,500.00
	Sosialisasi dan Penyuluhan terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	Jumlah masyarakat yang paham tentangperda/perkada yang ada di Kota Batam	Batam	900 orang	134,325,000.00	APBD II	Prioritas	900 orang	154,473,750.00
	Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Ramadhan	Terkendalnya jam operasional tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadhan	Batam	30 hari	501,525,000.00	APBD II	Prioritas	30 hari	576,753,750.00
	Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam	Terlaksananya pengamanan unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkis	Batam	25 kali	507,675,000.00	APBD II	Prioritas	25 kali	583,826,250.00
	Pendataan dan Pengawasan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya pendataan dan pengawasan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Batam	12 bulan	175,375,000	APBD II	Prioritas	12 bulan	201,681,250.00

Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemantapan Kinerja Tenaga Fungsional dan PPNS Satpol PP	Jumlah tenaga fungsional dan PPNS Satpol PP yang terampil	Batam	70 orang	107,200,000		Prioritas	50 orang	123,280,000.00
		2. Jumlah Linmas yang diberdayakan		344 orang				344 orang	
	Pembinaan Linmas dan Peringatan HUT Linmas	Jumlah Satlinmas yang paham tentang tugas dan fungsi linmas	Batam	100 orang	212,625,000.00		Prioritas	100 orang	937,250,000
	Peningkatan Pengamanan Pemilu Gubernur dan Walikota	Jumlah TPS yang diamankan	Batam	2923 TPS	876,735,000.00				-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

Rencana kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Batam Tahun 2020

No	Renja Tahun 2020						OPD Pelaksan/ Penanggungjawab
	Program/Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Volume	Sumber Dana			
				APBD Kota	APBD Prov	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			19,977,189,568.08	0	0	
	1.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			19,977,189,568.08	0	0	
	- Honorarium Pegawai kontrak/Tidak Tetap	Batam	11	365,400,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Upah Buruh/Tenaga Kontrak	Batam	463	16,142,400,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Honorarium Jasa Instruktur	Batam	4	6,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis	Batam	1	68,941,250.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Alat Listrik, dan Alat Elektronik Pakai Habis	Batam	1	8,998,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja prangko, materai dan benda pos lainnya	Batam	800	5,520,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja peralatan kebersihan dan alat pembersih	Batam	1	11,953,100.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja bahan bakar minyak dan gas	Batam	1	635,268,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja rekening air	Batam	12	48,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja rekening Listrik	Batam	12	235,500,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja langganan surat kabar, majalah dan tabloid	Batam	12	8,280,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja langganan internet, kawat dan faksimili	Batam	12	40,800,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja premi asuransi kesehatan	Batam	12	638,554,618.08	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja pencetakan dan penjiilidan	Batam	1	71,512,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja penggandaan (Fotocopy) dokumen	Batam	1	25,500,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja konsumsi acara/kegiatan	Batam	1	177,875,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja atribut pakaian dinas	Batam	687	439,102,200.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Pakaian Kerja Polisi Pamong Praja dan Atributnya	Batam	687	629,596,400.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja perjalanan dinas luar daerah	Batam	1	333,989,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja pajak daerah	Batam	19	41,500,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja retribusi daerah	Batam	12	3,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Rekening Telepon	Batam	12	12,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam

No	Renja Tahun 2020						OPD Pelaksan/ Penanggungjawab
	Program/Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Volume	Sumber Dana			
				APBD Kota	APBD Prov	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Batam	1	27,500,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			630,110,704.00	0	0	
	2.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur			245,979,500.00	0	0	
	- Belanja Pengadaan Scanner	Batam	2	6,435,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	Batam	5	54,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komputer	Batam	5	4,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Modal Pengadaan Partisi Ruangan	Batam	1	0	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Modal Pengadaan Printer	Batam	5	14,300,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	Batam	1	0	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner	Batam	5	20,894,500.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Modal Papan Pengumuman	Batam	1	1,350,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Modal Peralatan CCTV	Batam	1	95,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Mic Tiang	Batam	5	5,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik/Telepon/Air	Batam	1	45,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	2.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur			384,131,204.00	0	0	
	- Belanja bahan/peralatan pakai habis	Batam	1	8,400,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja sevice kendaraan bermotor	Batam	26	150,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	Batam	15	178,394,204.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Batam	1	32,337,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja	Batam	1	15,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat			3,404,205,000.00	0	0	
	3.1 Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar Di Lahan Milik Pemerintah			691,495,000.00	0	0	
	- Belanja sewa alat berat darat	Batam	15	36,720,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja konsumsi acara/kegiatan	Batam	5250	105,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja pencetakan dan penjilidan	Batam	5	175,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Honorarium Penyelenggara Kegiatan	Batam	2490	546,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Konsumsi Rapat	Batam	300	3,600,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	3.2 Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam			197,250,000.00	0	0	
	- Honorarium jasa narasumber	Batam	60	96,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja konsumsi acara/kegiatan	Batam	1260	31,500,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Batam	5	150,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Honorarium Penyelenggara Kegiatan	Batam	192	66,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam

No	Renja Tahun 2020						OPD Pelaksan/ Penanggungjawab	
	Program/Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Volume	Sumber Dana				
				APBD Kota	APBD Prov	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	-	Belanja Konsumsi Rapat	Batam	240	3,600,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
3.3	Sosialisasi dan Penyuluhan terhadap Peraturan Daerah Kota Batam				134,325,000.00	0	0	
	-	Honorarium jasa narasumber	Batam	6	0	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Belanja pencetakan dan penjiilidan	Batam	5	3,825,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Uang saku peeserta	Batam	0	0	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Belanja transportasi Air	Batam	200	0	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan	Batam	700	31,500,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Belanja Transportasi Darat	Batam	500	99,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
3.4	Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan				501,525,000.00	0	0	
	-	Belanja konsumsi acara/kegiatan	Batam	4140	120,750,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Belanja Pencetakan dan Penjiilidan	Batam	5	175,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Honorarium Penyelenggara Kegiatan	Batam	576	375,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Belanja Konsumsi Rapat	Batam	200	5,600,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
3.5	Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam				507,675,000.00	0	0	
	-	Belanja konsumsi acara/kegiatan	Batam	12500	312,500,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Belanja transportasi darat	Batam	0	0	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Belanja Pencetakan dan Penjiilidan	Batam	12	175,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Honorarium Penyelenggara Kegiatan	Batam	375	187,500,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Belanja Konsumsi Rapat	Batam	500	7,500,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
				0				Satpol PP Kota Batam
3.6	Pembinaan Linmas dan Peringatan HUT Linmas				212,625,000.00	0	0	
	-	Belanja jasa narasumber	Batam	8	12,800,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Uang saku peserta	Batam	120	15,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Belanja perlengkapan peserta	Batam	120	5,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Belanja pencetakan dan penjiilidan	Batam	3	6,825,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Belanja sewa ruangan rapat/pertemuan	Batam	120	67,500,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Belanja pakaian olah raga	Batam	120	50,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Belanja transportasi udara	Batam	2	4,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Belanja transportasi darat	Batam	240	9,900,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Belanja akomodasi hotel berbintang	Batam	62	41,600,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
3.7	Pendataan dan Pengawasan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum				175,375,000.00	0	0	
	-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan	Batam	12	175,200,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	-	Beanja Pencetakan dan Penjiilidan	Batam	4	175,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
3.8	Peningkatan Pengamanan Pemilu Gubernur dan				876,735,000.00	0	0	

No	Renja Tahun 2020						OPD Pelaksan/ Penanggungjawab
	Program/Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Volume	Sumber Dana			
				APBD Kota	APBD Prov	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Walikota						
	- Honorarium jasa narasumber	Batam	2	9,600,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja pencetakan dan penjiilidan	Batam	2	1,825,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja sewa ruangan rapat/pertemuan	Batam	1	48,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja konsumsi acara/kegiatan	Batam	1	146,150,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja pakaian hansip dan atributnya	Batam	4200	0	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja transportasi air	Batam	311	62,200,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja transportasi darat	Batam	3890	608,960,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	3.9 Pemantapan Kinerja Tenaga Fungsional dan PPNS Satpol PP			107,200,000.00	0	0	
	- Honorarium jasa narasumber	Batam	8	12,800,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja konsumsi acara/kegiatan	Batam	100	0	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja akomodasi hotel berbintang	Batam	4	1,600,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	Batam	100	82,500,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja transportasi udara	Batam	2	5,000,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Transportasi air	Batam	2	0	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja perlengkapan peserta	Batam	100	3,500,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	- Belanja pencetakan dan penjiilidan	Batam	14	1,800,000.00	0	0	Satpol PP Kota Batam
	TOTAL			24,011,505,272.08	0.00	0.00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2020 ini merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang disingkat RKA Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Oleh karena itu pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Renja Tahun 2020 ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam APBD, sehingga apabila di kemudian hari terjadi defisit anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian target kinerja dengan kemampuan anggaran yang ada.

Renja Tahun 2020 ini hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian Renja Tahun 2020 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020.

Batam, 26 Juli 2019

Kepala Satuan Polisi Pamong

Kota Batam



NURZALIE, AP, S.Sos

NIP. 19730206 199311 1 001